

PLN Raih Penghargaan dari BPKH RI

SEMARANG (KR) - Perusahaan Listrik Negara (PLN) meraih penghargaan sebagai Mitra Investasi Kategori Emiten dengan Scoring terbaik 2020 dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI. Dengan keberhasilan meraih penghargaan tersebut dilandasi kepercayaan dan keamanan yang ditunjukkan PLN dalam pengelolaan hubungan investasi. Penghargaan diserahkan Dewan Pengawas BPKH RI Muhammad Akhyar Adnan kepada Executive Vice President Keuangan Korporat PLN Teguh Widhi Harsono disaksikan Kepala BPKH RI Angito Abimayu dan Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly dalam kegiatan Annual Meeting BPH RI yang selenggarakan, Rabu (3/2).

Demikian siaran pers yang dikirim ke KR Biro Semarang, Kamis (4/2). Menurut Direktur Keuangan PLN, Sintya Roesly penghargaan ini merupakan bukti bahwa PLN merupakan mitra yang tepat dan terpercaya untuk investasi. Di samping itu hubungan kerja sama dalam bentuk mitra investadi yang dilakukan BPKH RI dan PLN sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi. Sedang Dewan Pengawas BPKH RI Yuslam Fauzi menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra strategis yang mendukung BPKH tahun 2020. (Fre)

Disarpora Gandeng 40 Grup Kesenian

MAGELANG (KR) - Setelah sempat berjalan namun kemudian dihentikan akibat Pandemi Covid-19, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disarpora) Kabupaten Magelang, akan kembali mementaskan beragam kesenian di Gedung Kesenian TIC Borobudur secara virtual. Sebanyak 40 grup kesenian di wilayah, akan dilibatkan dan akan pentas setiap minggunya. "Pertemuan pembahasan teknis pementasan secara virtual sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu dengan mengundang seluruh perwakilan grup kesenian yang akan tampil secara virtual. Pementasan virtual ini adalah kelanjutan dari jadwal pentas sebelumnya yang dilakukan secara terbuka sebelum terjadi Covid-19. Untuk itu akan kita lanjutkan kembali, namun tentu dengan cara virtual dan mengedepankan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19," kata Kepala Disarpora Kabupaten Magelang, Slamet Achmad Husein, Rabu (3/2).

Terkait hal itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Magelang. Karena pementasan dilakukan secara virtual, Satgas telah memberikan lampu hijau. Rencana, pentas akan dimulai awal Februari 2021 ini. "Pementasan virtual ini tanpa penonton. Jadi yang terlibat hanya penari dan pengiring sebanyak maksimal 25 orang dan kru pendukung," jelasnya. (Bag)

Kapolsek Ingatkan Bahaya Covid-19

SEMARANG (KR) - Semakin tingginya angka keterjangkitan Covid-19 di Ibukota Jateng, Semarang membuat para Kapolsek dan Danramil bekerja keras ke lapangan menekankan kepada masyarakat agar mematuhi imbauan pemerintah dalam upaya pencegahan. Kali ini aparat benar-benar tegas dalam mengimbau masyarakat demi keselamatan bangsa. Kapolsek Semarang Selatan Kumpul Untung Kistopo SH MH, Kamis (4/2) pagi meski dalam kondisi hujan lebat tetap mengunjungi Pasar Bulu Semarang yang menjadi wilayahnya untuk menemui warga pedagang dari kios ke kios. Komunikasi dari hati ke hati dilakukan untuk membangu kesadaran agar mematuhi protokol kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah. Kapolsek bersama staf juga membagikan masker kepada masyarakat agar setiap saat tidak ada alasan untuk tidak memakai masker.

"Kami bagian masker-masker kepada masyarakat agar mereka bisa mengganti maskernya setiap 4 jam. Intinya kami bangun kesadaran mereka agar jangan sampai melepas masker dan selalu jaga jarak di tempat umum. Menemui mereka dan bicara dari hati ke hati adalah solusi dalam menyadarkan mereka. Alhamdulillah mereka merespon dengan baik. Mereka juga siap menjadi mitra kami untuk ikut serta mengkampanyekan kepatuhan terhadap protokol kesehatan," ungkap Kapolsek. (Cha)



KR-Chandra AN

Kapolsek Semarang Selatan Kumpul Untung Kistopo SH MH membagikan masker di kios Pasar Bulu.

Magelang Siap Jadi Satelitnya Borobudur

MAGELANG (KR) - Kota Magelang diharapkan jangan sampai ketinggalan. Stasiun kereta api yang dibangun di Kota Magelang rencananya berdekatan dengan Terminal Soekarno Hatta. Dari arah Secang Kabupaten Magelang, rencana jalur dibelokkan ke kiri dan diharapkan stasionnya nanti berada di wilayah Kota Magelang. Demikian dikemukakan Walikota Magelang Ir H Sigit Widyonindito MT saat meresmikan beberapa proyek pembangunan di Kota Magelang tahun 2019 dan tahun 2020 yang dilaksanakan di Gedung DPUPR Kota Magelang, Rabu (3/2). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian dan me-mejet tombol sirine, dilanjutkan dengan peninjauan beberapa ruangan di Gedung DPUPR Kota Magelang.

Dikatakan Walikota Magelang, stasiun kereta api berdekatan dengan terminal bus, sehingga masyarakat tinggal jalan beberapa meter untuk menuju ke terminal bus atau stasiun kereta api atau akan mencari angkutan perkotaan. Bahkan direncanakan terminal jalan tol atau exit tol Bawen-Yogyakarta juga ada di sekitarnya. Walikota Magelang mengatakan kalau biasanya tergesa-gesa ke luar kota, namun nantinya akan terjadi pertumbuhan di kawasan Soekarno-Hatta itu. Ini semua diinginkan adanya pertumbuhan atau growth di Kota Magelang menjadi besar dan lebih baik. Juga sempat disinggung berkaitan dengan pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta, tol Yogyakarta-Bawen nantinya juga lewat Magelang. (Tha)

Komisi A DPRD Grobogan Soroti Mutasi Sekdes ASN



GEMA DPRD KAB. GROBOGAN

GROBOGAN (KR) - Komisi A DPRD Grobogan menyoroti mutasi Sekretaris Desa (Sekdes) berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan kepala desa di daerah itu yang dinilai se-wenang-wenang tanpa melalui proses mekanisme seperti memberi teguran atau peringatan. Terlebih Sekdes bersangkutan tidak tahu apa kesalahan yang diperbuat.

"Pada prinsipnya, seorang ASN memang harus bersedia dimutasi. Namun untuk memutasi seorang Sekdes ASN harus melalui proses yang benar. Hanya karena tidak suka, Sekdes bersangkutan langsung diusulkan mutasi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Itu yang harus saya kritisi," ujar Ketua Komisi A DPRD Grobogan H Musapak SH, Rabu (3/2).

Komisi yang membidangi

masalah pemerintahan yang dipimpinnya itu sudah dua menggelar rapat dengan pendapat masalah mutasi Sekdes, pekan lalu. Pertama dengan sejumlah Sekdes ASN di enam kecamatan dan pengurus Forum Sekretaris Desa Indonesia (Forsedes) Grobogan. Kedua, dengan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BK-P2D), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektoral, Asisten I Setda dan Bagian Hukum Setda.

Dalam rapat dengan pendapat dengan sejumlah Sekdes ASN, terungkap, ada rencana mutasi Sekdes Ringinpitu Kecamatan Tanggunharjo, Agus Joko Susilo, yang dinilai tidak melalui mekanisme yang benar, seperti teguran dan atau mediasi oleh Camat setempat. Akibatnya yang ber-

sangkutan keberatan dimutasi dan melapor ke Komisi A DPRD dan pengurus Forsedes Grobogan.

"Dalam Perbup Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perbup Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Perda Grobogan Nomor 7 Tahun 2016, Pasal 57 A ayat (1) menyebutkan, Sekdes yang diangkat menjadi ASN yang telah memasuki masa pensiun sebagai ASN tetap melaksanakan tugas sebagai Sekdes sampai dengan berusia 60 tahun.

Kemudian pada pasal sama ayat (2) dikecualikan jika Sekdes bersangkutan telah dipindahtugaskan ke SKPD berdasarkan keputusan bupati selaku pejabat pembina kepegawaian. Meski begitu, proses pemutasi Sekdes tersebut harus melalui mekanisme

yang benar. Untuk itu Komisi A dalam waktu dekat akan mengadakan pertemuan di kantor kecamatan dengan mengundang Camat Tanggunharjo, Kades dan Sekdes Ringin-pitu agar masalahnya bisa jelas dan transparan. Ibaratnya, Kades dan Sekdes itu suami dan istri. "Kadang ada masalah tetapi bisa diselesaikan," tegas politisi PDIP asal Kecamatan Purwodadi itu.

Hal sama diutarakan Wakil Ketua Komisi A H Sukanto SH MH, bahwa pada prin-

sipnya seorang ASN harus bersedia dimutasi. Namun khusus Sekdes ASN bisa dimutasi tapi harus ada permasalahan khusus.

"Menyangkut Sekdes Ringinpitu, apakah regulasinya sudah dijalankan dan dimediasi sampai di tingkat kecamatan atau belum? Jangan langsung dibuat SK mutasi tanpa parameter yang jelas," ujarnya.

Ketua Forsedes Grobogan Dwi Winarno, menambahkan, di daerahnya ada sekitar 70 Sekdes berstatus ASN. (Tas)



KR-M Taslim

Komisi A DPRD Grobogan saat mendengar pendapat dengan belasan Sekdes status ASN terkait isu mutasi yang dilakukan Kades.

Polisi Dukung Gerakan Jateng di Rumah Saja

SEMARANG (KR) - Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menegaskan pihaknya mendukung penuh 'Gerakan Jateng di Rumah Saja' pada Sabtu dan Minggu mendatang, tepatnya 6-7 Februari 2021.

Dukungan diberikan dalam bentuk operasi yustisi secara masif. "Prinsipnya jajaran Polda Jateng mendukung upaya Pemprov Jateng menurunkan angka kasus Covid-19 yang hingga kini grafiknya masih fluktuatif," ungkap Ahmad Luthfi, Kamis (4/2).

Ahmad Luthfi menyinggung dukungan itu mengingat orang yang terpapar Covid-19 di Jateng sangat tinggi, jika tidak segera turun menyebabkan was-was. Pucuk pimpinan jajaran Polda Jateng itu menyebutkan gerakan ini pada dasarnya menindaklanjuti

kebijakan pemerintah dalam melakukan PSBB Lokal atau PPKM Jawa-Bali. Selain itu, tentunya menekan angka Covid-19 di Jateng yang masih tinggi.

"TNI, Polri dan Satpol PP, yang tergabung dalam Satgas Yustisi mendasari Inpres nomor 6 tahun 2020 dalam rangka peningkatan disiplin dan penegakan hukum dengan melakukan peringatan dan penertiban di jalan-jalan," tuturnya.

Dijelaskan, operasi yustisi yang dilakukan pada dasarnya sama dengan yang selama ini terlaksa-

na. Tentunya, dengan menindak para pelanggar protokol kesehatan. Kapolda mengimbau masyarakat tidak berlebihan dalam mempersiapkan diri berpartisipasi dalam Gerakan Jateng di Rumah Saja.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengajak seluruh masyarakat Jateng untuk tetap di rumah selama dua hari. Melalui Gerakan Jateng di Rumah Saja, Ganjar berharap kerumunan dapat dikurangi dan angka positif Covid-19 bisa ditekan.

Gerakan Jateng di Rumah Saja pada 6-7 Februari 2021, berdasarkan Surat Edaran nomor 443.5/000-1933 tentang peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol

kesehatan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap II di Jateng.

Sejumlah daerah diminta melakukan penutupan sejumlah tempat publik, dengan kearifan lokal dan mengedepankan kondisi masing-masing.

Di antaranya jalan, toko, mall, pasar, destinasi wisata dan pusat rekreasi, pembatasan hajatan dan pernikahan serta kegiatan lain yang memunculkan potensi kerumunan seperti pendidikan, event dan lain-lain.

Selain itu, pada hari yang sama akan digelar operasi yustisi secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota di Jateng oleh Satpol PP, TNI/Polri dan instansi terkait. (Cry/Bdi)

Ganti Rugi Warga Terdampak Bendungan Bener

PURWOREJO (KR) - Sebanyak 106 warga Desa Nglaris dan Limbangan di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo menerima ganti kerugian atas tanah mereka. Mereka adalah pemilik dari 154 bidang tanah terdampak pembangunan Bendungan Bener yang lokasinya berada di Desa Nglaris.

Penyerahan ganti rugi dilaksanakan di aula Bumdes Nglaris disaksikan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), Kanwil Pertanahan Jateng, Pemkab Purworejo, dan DPRD Purworejo. Para penerima tidak mendapat uang tunai, melainkan buku tabungan yang telah berisi nominal sesuai pembayaran pemerintah.

Ratusan warga itu telah menyepakati nilai ganti kerugian yang dihitung pemerintah. "Sebenarnya sudah 1.231 bidang tanah terdampak yang nilai ganti kerugiannya sudah disepakati antara pemerintah dan pemilik. Namun untuk tahap pertama ini, pembayaran baru dilakukan untuk 154 bidang tanah," ungkap Kepala BBWSO Yogyakarta Dwi Purwatoro ST MM, usai penyerahan ganti kerugian, Rabu (3/2) sore.

Menurutnya, pemerintah dalam waktu dekat akan membayarkan ganti rugi bagi masyarakat yang belum menerima. Berbagai persyaratan berkas dan data dari masyarakat telah dikirimkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Ke-

uangan. "Untuk data sudah *clear* semuanya, dan sekarang 'bola' terkait pembayaran itu ada di tangan LMAN," tuturnya.

Sementara itu, hampir seribu warga tujuh desa Kecamatan Bener dan Kecamatan Gebang yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend) mendatangi tempat pembayaran ganti rugi. Warga mempertanyakan kejelasan kapan tanah terdampak milik mereka dibayar pemerintah. Korlap Paguyuban Masterbend Eko Siswoyo mengatakan, ribuan terdampak lainnya memiliki hak yang sama karena telah menyepakati nilai ganti rugi tersebut.

Kami datang ke Nglaris untuk memastikan, kapan tanah kami

dibayar, sebab sesuai kesepakatan pembayaran akan dilakukan paling lama dua bulan dari hasil musyawarah kesepakatan penghitungan harga tanah. Kami siap mendukung pembangunan namun hak-hak warga juga harus dipenuhi," terangnya.

Anggota DPRD Purworejo RM Abdullah menuturkan, pembayaran tanah yang sudah disepakati, tergantung dari kelengkapan berkas. "Seluruh berkas itu sudah lengkap, tapi mengapa belum dilakukan pembayaran dengan alasan masih diverifikasi. Padahal sesuai kesepakatan pembayaran maksimal dua bulan setelah kesepakatan dan sekarang sudah menjelang batas waktunya," ungkapnya. (Jas)

PLN Normalkan Pasokan Listrik

SEMARANG (KR) - Gerak cepat, PLN berhasil normalkan kembali sistem kelistrikan yang sempat terdampak oleh cuaca ekstrem di Jateng-DIY. Pada Rabu (3/2), hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Klaten dan Boyolali, Jateng dan sebagian wilayah di DIY, menyebabkan gangguan sejumlah jaringan listrik. "Alhamdulillah, kita berhasil menormalkan kembali pasokan listrik yang sempat terdampak cuaca ekstrem di Klaten, Boyolali, dan Kulonprogo," terang General Manager PLN UID Jateng & DIY, Feby Joko Priharto, Kamis (4/2) melalui siaran persnya. Feby menjelaskan cuaca ekstrem menyebabkan banyaknya pohon tumbang dan mengenai jaringan listrik.

Daerah yang sempat terdampak gangguan antara lain Ceper, Bayat, Cawas, Pedan, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Joton, Bumiaeng, Granting, Brangkal Gondang Alas, Karanglo, Setran, Karangngoko, Birin, Jati-anom, Tegalduwur Pokak, Ceper, Setran, Wonosari, Jatipuro, Trucuk, Pluneng, Kebonarum, Kebondalem Lor, Bugisan, Jatisambi, Deles, Klaten Utara, Wonosidi, Driyan, dan Nanggulan. (Cha)



KR-Isitmeva

Tiang listrik yang roboh diterjang angin di Boyolali.

Mimbar Legislatif

Di Rumah Saja Tidak Efektif Jika Tanpa Sanksi

KETUA DPRD Jateng Bambang Kusriyanto mengkhawatirkan kebijakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terkait Gerakan Jateng di Rumah Saja selama dua hari, Sabtu-Minggu (6-7/2) tidak bisa berjalan efektif, jika tanpa sanksi bagi si pelanggar. Hal tersebut dibuktikan dengan sejak awal pandemi pada Maret 2020, Pemprov Jateng sudah berupaya maksimal mencegah penyebaran Covid-19. Tetapi

Diakui kesadaran masyarakat Jateng untuk bersama-sama mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 masih rendah. Bahkan dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini, di Jateng muncul klaster-klaster Covid-19 baru, sehingga menyebabkan daya tampung rumah sakit semakin menipis. Kalau selama dua hari atau 48 jam seluruh masyarakat disuruh untuk tinggal di rumah, sebenarnya itu sama saja dengan kebijakan lockdown. Tetapi kebijakan Ganjar Pranowo sifatnya hanya imbauan, bukan peraturan yang disertai sanksi bagi yang melanggar, karena yang memiliki wilayah sebenarnya kabupaten/kota.

Jika kebijakan lockdown tersebut benar-benar diterapkan, maka yang akan lebih berperan dalam pelaksanaannya adalah bu-



KR-Budiono

Bambang Kusriyanto

pati dan wali kota di Jawa Tengah, karena mereka yang punya wilayah. Seharusnya Pemprov Jateng sifatnya melakukan supervisi atas kebijakan tersebut, seperti melakukan monitoring dan supporting ke kabupaten/kota se-Jateng, termasuk mengantisipasi dampaknya. Kebijakan tersebut juga mensyaratkan peran aktif Ketua RW dan Ketua RT sebagai pengampu satuan wilayah sehingga kini penyebaran terus meningkat. Diikuti kesadaran masyarakat Jateng untuk bersama-sama mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 masih rendah. Bahkan dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini, di Jateng muncul klaster-klaster Covid-19 baru, sehingga menyebabkan daya tampung rumah sakit semakin menipis. Kalau selama dua hari atau 48 jam seluruh masyarakat disuruh untuk tinggal di rumah, sebenarnya itu sama saja dengan kebijakan lockdown. Tetapi kebijakan Ganjar Pranowo sifatnya hanya imbauan, bukan peraturan yang disertai sanksi bagi yang melanggar, karena yang memiliki wilayah sebenarnya kabupaten/kota.

(Disampaikan Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman)